

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Hasil-Hasil Ketetapan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I)*, Jakarta: AMAN, 1999.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Jilid I, Leiden: EJ Brill, 1931.

Forest Watch Indonesia, *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2018*, Jakarta, 2018.

Frans Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

John Griffiths, "What is Legal Pluralism, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986.

John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Peta TNKS dan Kawasan Hutan Negara*, 2021.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. Kehl am Rhein: N.P. Engel Verlag, 2005.

Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Jakarta: Liberty.

Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2012.

S. James Anaya, *Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional*, Edisi Ke-2 Oxford: Oxford University Press, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sirait, Martua *et. al.*, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: HuMa, 2010.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.

Tania Murray Li, *Keinginan untuk Meningkatkan: Pemerintahan, Pembangunan, dan Praktik Politik*, Durham: Duke University Press, 2007.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

World Resources Institute (WRI), *Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change*, Washington D.C.: WRI, 2014.

Yance Arizona *et. al.*, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, Jakarta: HuMa, 2013.

B. Laporan Penelitian, Jurnal, Makalah, dan Buletin

Adriaan Bedner & Stijn van Huis, *Pluralitas Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional Leiden*, 2010

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun AMAN 2023*.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Laporan Tahunan Perlindungan Hak Masyarakat Adat*, 2020.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, *Catatan Konflik Kawasan Hutan dan Masyarakat Adat Bengkulu*, 2025.

Dinas Sosial Kabupaten Lebong, *Dokumen Usulan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Sungai Lisai kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia*.

Faiq Tobroni, Memperkuat Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3, 2013.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2024 Konsorsium Pembaruan Agraria*, Jakarta, 2025.

Laporan Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lebong, 2023.

Layla Ekrep dan Endriatmo Soetarto, Dampak Penetapan Taman Nasional Terhadap Struktur Agraria dan Hak Kelola Lahan, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 4, 2021.

Muhamad Erwin dan Yusriyadi, Adat National Park as Legal Politics of Living Space of Anak Dalam Tribe, *Diponegoro Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2024.

SPTN Wilayah VI Bengkulu, *Hasil Monitoring Kamera Trap TNKS*, 2021.

C. Internet

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Data dan Publikasi Wilayah Adat di Indonesia*, <https://www.aman.or.id>

D. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

E. Wawancara

Adha Yani, Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Lisai

Hasan, Wawancara dengan Ketua Adat Sungai Lisai

Kidang Barada, Wawancara dengan Ketua PD AMAN Taneak Jang

